

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN NOGOTIRTO TAHUN 2021

Ilham Hidayatullah Pasha Wangdi

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta
Correspondence Author: ilham.wangdi@students.amikom.ac.id
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the management of ADD to improve the welfare of the residents of Nogotirto Village from an economic perspective. This research is useful so that it can be used as a guide for the ADD program as well as a reference for making decisions. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods, with data collection using documentation, interviews and observation techniques. The population of this research is community leaders and village officials in Nogotirto village using purposive sampling technique. The analysis of this study has applied the principle of equality and fairness in the distribution of ADD 2021 in Nogotirto Village. It can be concluded that the implementation of ADD 2021 has been directly felt by the community, so that it can improve the welfare of the community as a whole. Development in Nogotirto Village from ADD 2021 onwards is the construction/rehabilitation/improvement of health facilities/housing road surfaces, culverts, construction of waste disposal facilities, construction of clean water sanitation facilities, village competitions and institutional development activities.

Keywords: Economy; Village Fund Budget; Welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Nogotirto dari segi ekonomi. Penelitian ini bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai pedoman program ADD sekaligus sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Populasi penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Nogotirto dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis penelitian ini telah menerapkan prinsip pemerataan dan keadilan dalam pembagian ADD 2021 di Desa Nogotirto. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ADD 2021 telah dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan di Desa Nogotirto mulai ADD 2021 dan seterusnya adalah pembangunan/rehabilitasi/perbaikan permukaan jalan perumahan/fasilitas kesehatan, gorong-gorong, pembangunan sarana pembuangan limbah, pembangunan sarana sanitasi air bersih, lomba desa dan kegiatan pengembangan kelembagaan.

Kata Kunci: Anggaran Dana Desa; Ekonomi; Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Hakikat dari tujuan pembangunan ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan tanpa memandang perkembangan ekonomi, politik serta keadilan sosial bagi masyarakat. Cakupan pembangunan meliputi pembangunan ekonominya masyarakat ataupun pembangunan sektor sosial politik, sehingga pembangunan tak hanya terlihat pada pembangunan fisiknya saja. Penelitian dilakukan di kalurahan Nogotirto pada Tahun 2022. Pembangunan ekonomi ialah proses berjangka panjang di sebuah masyarakat untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Tujuan dari pembangunan ekonomi guna meningkatkan produktivitas serta pendapatan nasional runlets. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, selalu ditunjukkan dengan adanya pembangunan ekonomi. Jika kita melihat perkembangan masyarakat pedesaan di masa Orde Baru atau masa lampau yaitu, pembangunan desa ialah pendekatan serta metode yang direncanakan untuk pembangunan negara secara terpusat. Istilah pembangunan desa yang terkenal pada masa orde baru ialah Pembangunan Desa (Bangde) serta Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Namun, istilah Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang lebih umum di erad reformasi.

Pelaksanaan pembangunan desa diharuskan sejalan terhadap peran serta masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam mempergunakan sumber daya yang dibutuhkan guna membangun serta merancang perekonomiannya sendiri dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Tujuan pengalokasian dana desa atas dasar Peraturan Pemerintah Pasal 68 ayat (1) huruf c Nomor 72 Tahun 2015 terkait Desa ialah 1) meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya; 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan; 4) promosi swadaya di masyarakat pedesaan. Berdasarkan tujuan alokasi dana desa tersebut di atas, pemerintah berharap pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada kegiatan membantu desa menjadi mandiri, maka salah satu strateginya pemerintah adalah melalui ADD (penyediaan dana desa). Guna meningkatkan kapasitasnya pemerintah desa derta memberdayakan masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa mempergunakan ADD sebesar 70% serta sebesar 30% dipergunakan sebagai biaya operasionalnya pemerintah desa. Tujuan dari

penelitian ini ialah mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambatnya dalam pengelolaan ADD guna memberdayakan masyarakat pedesaan. Oleh karena, kegagalan implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua kategori (Wahab, 1990), yaitu tidak menerapkan kebijakan dimana tindakan ini menyiratkan bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta kegagalan kebijakan, dimana ini terjadi ketika kebijakan tertentu telah diterapkan, tetapi kondisi eksternal kebijakan tersebut tidak mendukung sehingga kebijakan tersebut tidak menghasilkan dampak yang diinginkan atau hasil akhir. Terdapat kondisi ideal dalam menerapkan inovasi sehingga dapat mendorong inovasi dari waktu ke waktu (Bennett, 2004).

Undang-Undang Perdesaan No. 6 Tahun 2014 yang telah disahkan menyatakan bahwa posisi pemerintah desa makin menguat, dikarenakan diyakini pemerintah desa lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat daripada pemerintah kabupaten, yang benar-benar tentang desa, daerah, ruang masalah yang lebih luas dan kompleks dengan permasalahan yang ada. Masyarakat juga dilibatkan dalam mempergunakan sumber daya yang dibutuhkan guna membangun serta merancang ekonomi sendiri. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan umum dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dikutip dari web Nogotirto, pengelolaan alokasinya dana di desa Nogotirto, kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdiri dari 8 (delapan) dusun yaitu: Cambahan, Kajor, Karang Tengah, Kwarasan, Mlangi, Mlangi Sawahan, Nogosaren, Ponowaren, yang berjumlah 8475k (kepala keluarga). Keadaan perekonomiannya Desa Nogotirto di dominasi pada wiraswasta, PNS, pensiunan, POLRI/TNI, karyawan, petani/perikanan, peternak, dan buruh pekerja seni. Di kalurahan Nogotirto mengalokasikan dana pada tahun 2021 berkisar Rp 1.251.82.920.00.

METODOLOGI

Metode penelitian dan analisis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan analisis data lapangan menggunakan model analisis Milles dan Huberman (Sugiyono, 2011). Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah metode dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi(gabungan). Analisis data berifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Langkah pada penelitian deskriptif kualitatif yang pertama, melakukan pengumpulan data berlangsung, wawancara, dokumentasi, analisis hasil wawancara, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) dengan kutipan berikut:

The data analysis technique used refers to the interactive analysis model from Miles, Huberman & Saldaña (Milles et al., 2014), which was quoted from the journal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022), namely The data is analyzed using several steps, namely analyzing the data with three steps: data condensation, presenting data (data display), and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification). Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data.

Sebagai alat analisis, data yang digunakan dalam penulisan ini ialah data yang terkait dengan pelaksanaan program penyaluran keuangan desa untuk kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 11 oktober 2022 di Kalurahan Nogotirto oleh bapak Muflikhun selaku kaur pangraripta, kutipan wawancara:

“sebelum membahas ADD, saya sampaikan pendapatan kalurahan Nogotirto berasal dari beberapa sumber, yang pertama yaitu: (1) pendapatan asli desa, yaitu pendapatan yang di hasilkan dari kegiatan usaha yang di lakukan oleh desa, (2) dana transfer dari pemerintah pusat. Di antaranya, dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan yang diterima kalurahan oleh pemerintah pusat, untuk add sendiri secara penggunaan memang luas, bisa untuk pembangunan, kegiatan peberdayaan masyarakat, kegiatan pemerintahaan, gaji pegawai, gaji pamong, jaminan sosial pamong kalurahan, oprasional pemerintahan kalurahan, tunjangan pamong, tunjangan bpd, oprasional bpd, kegiatan jaminan sosial staff, penyediaan bantuan pendidikan tahun ajaran baru, dan bantuan hari raya. Penggunaan dana ADD tahun 2021, untuk pembangunan dengan anggaran 75jt untuk Gedung kalurahan. Anggaran add hampir 30% untuk gaji karyawan. Add Nogotirto tahun 2021 sebesar 1.251.82.920.00. Desa nogotirto sebenarnya merupakan desa yang sudah maju karena nya dana ADD terhitung besar”

Selanjutnya Bapak Muflikhun mengatakan pendapatnya mengenai kendala dari pengalokasian dana desa:

“Sejauh ini tidak ada kendala dari sudut pandang pemerintah, dikarenakan ADD ini merupakan dana yang cakupannya luas, artinya bisa di gunakan untuk apa aja. Beda seperti dana desa yang ada surat edaran yang berisi aturan-aturan penggunaannya. Add ini luas untuk pembinaan, kesejahteraan, atau pembangunan desa juga boleh. ADD sebenarnya dana yang terlalu mudah di kelola karna sifatnya luas, maka tidak ada kendala yang terlihat dari sudut pandang pemerintah”.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa dananya pemberdayaan masyarakat (ADD) sebagian besar telah dipergunakan dengan baik, dan penggunaannya disesuaikan peruntukannya. Dalam pengelolaan ADD terdapat beberapa faktor pendukung ialah keterlibatan warga serta faktor penghambatnya adalah kurangnya kontrol masyarakat secara langsung. Kehidupannya masyarakat pada masa itu terjadi proses pembangunan. Dilakukannya pembangunan yakni guna meningkatkan serta mendukung kualitas hidup masyarakatnya. Seluruh aspek kehidupannya masyarakat telah mengalami perkembangan, baik dari yang terkecil sampai terbesar. Secara umum, hal tersebut adalah bentuk keinginannya

masyarakat guna bergerak kearah yang lebih baik lagi. Jalan adalah suatu penghubung dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, jalan adalah keperluan yang penting untuk masyarakat dalam memajukan pembangunan diberbagai sektor antara lain, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Pemerintah menetapkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 terkait desa, bahwasanya "sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah". Paling sedikit 10% dari kota ke desa, persentase setelah alokasi khusus dipotong secara profesional dan didistribusikan ke setiap desa. Pada saat yang sama, Peraturan Pemerintah no. 43 Pasal 100 Tahun 2014 pasal 100 yang mengatur mengenai target belanja ADD dana desa, "dipergunakan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk penyelenggaraan pengelolaan desa, pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) dari total anggaran yang digunakan untuk gaji pendapatan tetap dan tetua desa, fungsi pengelolaan desa, tunjangan dan fungsi dan manfaat BPD (Badan Pembina Desa), RT, RW". Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, langkah pengelolaan ADD yaitu:

1. Perencanaan berdasarkan dari hasil penelitian bisa diketahui bahwasanya perencanaan pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam pembangunan fisik Desa Nogotirto bisa dilihat dari tata cara perencanaan yang melibatkan tokoh masyarakat serta masyarakat dilibatkan dalam perencanaannya dan masyarakat diberdayakan untuk menyampaikan ide/pikiran sebagai penentu pembangunan misalnya, perbaikan sarana dan prasarana, pemboran sumur, perbaikan pagar, pembangunan buldoser, pembangunan jalan yuntuk kepentingannya warga yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang dikuasai, dari Dana Desa (ADD), dapat mengajukan permohonan dengan benar.
2. Implementasi dana desa untuk pembangunan fisik desa Nogotirto bisa terlihat dari hasil penelitian serta dapat diketahui dari hasil wawancara penelitian bahwasanya penyelenggaraan yang dilaksanakan mulai tahun 2021 berjalan sesuai dengan pertimbangan yang direncanakan secara baik, tetapi terdapat masalah yaitu: kesesuaian rencana tahap awal dalam pembangunan fisik desa Nogotirto, kurangnya pengawasan terhadap ADD (administrasi dana desa). Kami membahas hal-hal contohnya pengeboran sumur, perbaikan jalan, pembangunan fasilitas buldoser, pembangunan jalan serta lainnya yang harus diperhatikan pada semua aktivitas desa.
3. Organisasi usaha Berdasarkan hasil kajian PP Pemerintahan Desa Tahun 2021, organisasi usaha penyelenggaraan ADD (Alokasi Dana Desa) yang ditujukan guna

pembangunan fisik Desa Nogotirto berpedoman pada tata kerja dan aturan yang telah ditetapkan. dari papan. setiap kegiatan yang dikelola. hasilnya harus ditetapkan oleh dewan desa, agar administrasi ADD dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hasil kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.

4. Berdasarkan hasil penelitian, laporan serta pertanggungjawaban pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembangunan fisik desa Nogotirto telah diberitahukan kepada paguyuban desa dan BPD, agar semua hasil pengelolaan dananya bisa diperhitungkan.

Data besaran pengalokasiannya dana di desa Nogotirto pada tahun 2021 berkisar Rp.1.251.82.920,00 per tahunnya, mengingat masih terdapat kemiskinan kesehatan, pendidikan dasar, pelibatan masyarakat, potensi ekonomi daerah serta jumlah penduduknya, sehingga dana tersebut sudah termasuk anggaran guna perekayasaan. Pengelolaan penggunaan alokasi dana desa Nogotirto yaitu pembangunan, drum, perbaikan jalan desa, kegiatan LPM/PKK, iuran, konsultasi, biaya pribadi, kelompok tani, kegiatan pembinaan sosial budaya serta keseniannya masyarakat, bantuan operasionalnya lembaga kemasyarakatan dalam aktivitas bina lingkungan serta selebihnya guna kegiatan desa yakni perlengkapan kantor serta alat tulis lainnya. Pengelolaan ADD di Desa Nogotirto, pengalokasiannya dana ke tiap desa hanya diarahkan untuk pembangunan kanal, jalan serta kantor desa serta dan santunan perangkat desa, sedangkan infrastruktur lainnya belum terpengaruh, seperti pembangunan sanitasi yang lebih diperlukan warga. Belum dilakukan penanganan secara benar meskipun telah pada beberapa dusun seperti dusun Cambahan, Nogosaren, dan Ponowaren.

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan

Indikator	Sebelum ada ADD	Sudah ada ADD	Keterangan
Tingkat Pendidikan	50%	60%	Mengalami peningkatan
Tingkat Kesehatan	85%	95%	Mengalami peningkatan
Tingkat pendapatan	1.770.000-15.000.000	2.200.000-25.000.000	Mengalami peningkatan
Infrastruktur	45%	90%	Mengalamai peningkatan 55%

Sumber: desa Nogotirto, 2021

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dicantumkan pada table 1, bisa terlihat bahwa pada tingkat pendidikan yakni masyarakat Nogotirto telah menerapkan wajib belajar dua belas tahun, jika di tinjau dari latar belakang pendidikannya bahkan banyak yang melanjutkan hingga kejenjang Sarjana. Namun mayoritas pendidikan masyarakatnya ialah SMA.

Dampak program ADD yang ada belum merata serta belum dirasakan masyarakat sekitar pada bidang pendidikan, karena alokasi dananya pada Pendidikan masih terlalu sedikit di alokasikan ke Pendidikan. Namun, adanya ADD sangat membantu peningkatan kesejahteraan dalam bidang Pendidikan meskipun belum maksimal. Pada tingkat kesehatan, program pengalokasiannya dana dalam pelayanan kesehatan yakni pembangunan saluran air bersih serta tambak disetiap desa, hingga pembuatan tambak tersebut, sanitasi yang berkaitan dengan kesehatan menjadi lebih sehat dan membuat masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Sudah tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat Desa Nogotirto, perihal tersebut bisa dilihat dari makanan yang dikonsumsi masyarakat cukup. Tak hanya itu, dalam menangani ibu yang akan melahirkan, warga Desa Nogotirto sangat sedikit mempergunakan dukun bayi ataupun tabib, sehingga tidak terdapat angka kematian serta ibu melahirkan. Masyarakat desa Nogotirto lebih memilih berobat ke bidan, puskesmas serta puskesmas apabila mengalami permasalahan kesehatan. Jarang sekali terdapat warga yang sakit dikarenakan kurang asupan makanan, dikarenakan kebutuhan kalori serta pola makanannya terpenuhi secara baik. Pada tingkat penghasilan, berdasarkan Sistem Pengawasan Mutu Program Pertanian, Perikanan, serta Perencanaan Wilayah (SKPMP) tahun 2021, tingkat pendapatan bulanan di atas Rp 500.000.

Kehadiran ADD tersebut tak berdampak positif dengan pendapatannya masyarakat dikarenakan administrasi dan programnya ADD desa Nogotirto kekurangan. Yang menggunakan Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan yakni dusun mlangi, cambahan, dengan program yang berupa kerajinan tangan oleh ibu PKK serta kelompok tani. Program ADD sudah dimanfaatkannya untuk pendidikan kewirausahaan dan menciptakan ekonomi kreatif agar perekonomiannya masyarakat meningkat. Pada infrastruktur, dari program alokasi sumber daya kesehatan dana desa, yaitu. pembangunan tambak dan saluran air bersih di setiap desa dengan membuat tambak tersebut, sanitasi yang berkaitan dengan kesehatan lebih sehat dan mensejahterakan masyarakat dari segi kesehatan.

Dari pernyataan diatas bisa diketahui bahwasanya tujuan yang dicapai oleh program penyaluran dana desa Nogotirto adalah untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, pendapatann serta meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan pendapatan desa tercapai sepenuhnya meskipun belum maksimal pada bidang pendidikan. Perangkat desa lebih memprioritaskan pembangunan, jalan serta pembuangan air bersih yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar serta komunitas, perangkat desa kurang memprioritaskan aktivitas ekonomi produktif sebagai bentuk program alokasi sumber daya desa.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik Desa Nogotirto. Bentuk partisipasinya ialah pertanggungjawaban serta pelaksanaan guna memberikan tenaga, pemikiran ataupun ide yang sangat mempengaruhi perkembangan serta kemajuan pembangunan fisik menjadi lebih baik di Nogotirto, dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar desa Nogotirto dan masyarakat berpartisipasi dengan ikut serta dalam perencanaannya. Pemerintah sekitar Desa Nogotirto memberikan dukungan dengan mengeluarkan kebijakan yang berbentuk buku panduan guna melaksanakan pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Kini buku tersebut menjadi pedoman pemerintah desa Nogotirto dalam pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa). Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia. Pengetahuan yang dimiliki aparaturnya pemerintahan desa Nogotirto yaitu cukup di bidangnya. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan kegiatannya desa, mereka mempunyai keterampilan yang baik. Kemudian peralatan dari desa Nogotirto pun mempunyai tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan berbagai tugas. Lebih lanjut, masyarakat memberikan pemikiran ataupun ide tentang pengelolaan ADD untuk pembangunan. Dalam kegiatan pengelolaan ADD di desa Nogotirto, masyarakat ikut melaksanakan gotong royong

Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Nogotirto, yakni sinkronisasi perencanaan diantara tingkat desa dengan kecamatan sangat rendah, sehingga mengalami beberapa kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Nogotirto. Desa akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dikarenakan kesesuaian perencanaan di tingkat desa serta kecamatan sangat kurang. Bisa dibuktikan dengan masih terdapat beberapa jalan yang rusak di Desa Nogotirto, hal tersebut karena belum disentuh oleh ADD yang masih terhalang dari ketidaksesuaian keputusan antara di tingkat desa dengan tingkat kecamatan. Selain itu, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan pernyataan dari perangkat desa bahwasanya dana desa tidak bisa diabaikan begitu saja serta masih dianggap kurang, sehingga masih terbatasnya penunjang operasional administrasi mengingat aspek yang vital dalam melaksanakan pembangunan desa adalah dana desa. Sehingga diperlukan evaluasi ulang terkait penyelenggaraan ADD di desa Nogotirto yang bertujuan bisa mengelola secara baik serta tepat sasaran berapapun dana yang didapatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian dana setiap desa yang didistribusikan dari ADD dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2021 dibagi berdasarkan potensi setiap desa, luas wilayah serta jumlah penduduknya. Program penyaluran dana desa Nogotirto untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, pendapatann serta meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan pendapatan desa tercapai sepenuhnya meskipun belum maksimal pada bidang pendidikan. Perangkat desa lebih memprioritaskan pembangunan, jalan serta pembuangan air bersih yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar serta komunitas, perangkat desa kurang memprioritaskan aktivitas ekonomi produktif sebagai bentuk program alokasi sumber daya desa.
2. Faktor penghambat serta pendorong dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraannya masyarakat. Beberapa faktor pendukung yang mendukung pengelolaan Dana Desa Pembangunan Fisik (ADD) Desa Nogotirto ialah dukungan politik dari masyarakat, kualitasnya staf serta pemerintah daerah yang mendukung kegiatan tersebut, kerjasama untuk memajukan pembangunan desa yang lebih progresif. Namun terdapat faktor penghambat pengelolaan dana desa (ADK) dalam pembangunan fisik desa Nogotirto yakni kurangnya intensitas sosialisasi, jumlah ADD (Alokasi Dana Desa), sinkronisasi diantara perencanaan ditingkat kecamatan serta desa sangat rendah serta SDM (Sumber Daya Manusia) maupun tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembangunan kurang optimal.
3. Dalam perspektif ekonomi, pelaksanaan serta dampak dari program alokasi dana desa tahun 2021 di Desa Nogotirto belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dikarenakan dalam pengelolaan ADDnya kurang transparan, sikap apatisnya masyarakat, pendidikannya masyarakat yang kurang dan dalam pembagian porpori ADD 2021 di Desa Nogotirto belum mempergunakan asal adil. Sebagai desa modern dan sudah sangat maju, dana yang di terma desa nilainya sudah sangat besar bagi penulis, sehingga pemerintah harusnya memfokuskan kepada usaha-usaha mikro dan memberikan bantuan Pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Meskipun anggarannya sudah ada, penulis menyarankan anggarannya di tingkatkan lagi karena anggaran untuk bantuan Pendidikan nominalnya sangat kecil di banding dengan anggaran-anggaran lainnya seperti renovasi Gedung atau belanja seragam.

REFERENSI

- Bennett, R. J. 2004. Implementing innovation. In ASEE Annual Conference Proceedings. <https://doi.org/10.1177/107554708300500204>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.